

**ANALISIS PERBANDINGAN RASIO EFISIENSI DENGAN RASIO
KESERASIAN BELANJA PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SE-SUMATERA
BAGIAN SELATAN TAHUN 2015-2017**

SKRIPSI



Nama : Pebby

NIM : 22 2016 084

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

**ANALISIS PERBANDINGAN RASIO EFISIENSI DENGAN RASIO
KESERASIAN BELANJA PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SE-SUMATERA
BAGIAN SELATAN TAHUN 2015-2017**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Pebby
NIM : 222016084**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pebby
NIM : 222016084
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Rasio Efisiensi dengan Rasio Kecerahan Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2017

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Maret 2020



Pebby

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Perbandingan Rasio Efisiensi
dengan Keserasian Belanja pada Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Se-
Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2017
Nama : Pebby
NIM : 222016084
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Februari 2020

Pembimbing I,



Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0206046303/784021

Pembimbing II,



Dr. Fadhil Yamali, S.E., Ak., M.M
NIDN/NBM : 0217107002/1191648

Mengetahui,
Dekan
Jurusan Program Studi Akuntansi



Betri, S.E., M.Si., Ak., C.A
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

☞ *“Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”*

(QS. Ali Imran: 139)

☞ *Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah harapan*

(Penulis)

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:

☞ *Ayahandaku (Alm. Johan) dan Ibundaku
(Hasimah) tercinta*

☞ *Kakakku, Ayukku, serta Keponakanku tersayang*

☞ *Dosen Pembimbingku*

☞ *Almamaterku yang kubanggakan*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbil'alaamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Analisis Perbandingan Rasio Efisiensi dengan Rasio Keserasian Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2017 dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih sayang dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan terkhusus kepada kedua orang tua, Alm. Johan dan Hasimah yang sangat berjasa dalam mendidik, mendoakan, memberi semangat dan motivasi, serta telah membesarkan penulis dengan penuh cinta, kasih sayang tanpa keluh kesah. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Sunardi, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Fadhil Yamali, SE., Ak., MM selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas serta penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dari segi ilmu ataupun pengalaman. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Rahmat Basuki, S.E., M.Ak., Ak.,CA selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dari semester satu sampai dengan sekarang.
5. Bapak Drs. Sunardi, SE., M.Si dan Bapak Dr. Fadhil Yamali, SE.,Ak.,MM selaku pembimbing skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Pengurus di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.
8. Saudara-Saudariku yang telah banyak membantu dan memberikan suport dalam penulisan skripsi ini.

9. Keluarga Paket 13 angkatan 2016 Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Sahabat-sahabatku dan Teman-teman seperjuangan serta seluruh Angkatan 2016.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis

Pebby

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori	11
1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	11
a. Pengertian Kinerja Keuangan.....	11
b. Tujuan Pengukuran Kinerja.....	13
c. Manfaat Pengukuran Kinerja.....	15
d. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja	16
e. Informasi yang digunakan untuk Pengukuran Kinerja.....	17
f. Sistem Pengukuran Kinerja	18
3. Teori Efisiensi.....	19
a. Pengertian Efisiensi	19
4. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	20
a. Rasio Efisiensi Belanja.....	21

b. Rasio Keserasian Belanja	22
B. Penelitian Sebelumnya.....	24
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Operasionalisasi Variabel	30
D. Data yang Diperlukan	30
E. Metode Pengumpulan Data.....	31
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	32
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Data Umum	35
a. Gambaran Umum Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan	35
B. Pembahasan Hasil Penelitian	48
1. Rasio Efisiensi Belanja Daerah	49
2. Rasio Keserasian Belanja Daerah	61
3. Perbandingan Rasio Efisiensi Belanja dengan Rasio Keserasian Belanja.....	84
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Simpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Anggaran Belanja Daerah, Realisasi Belanja Daerah, Belanja Operasi, dan Belanja Modal Kab/Kota Provinsi Se- Sumatera Bagian Selatan tahun 2015-2017	7
Tabel II.1 Kriteria Efisiensi Belanja	22
Tabel II.2 Kriteria Penilaian Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan Belanja Modal Terhadap Total Belanja	24
Tabel II.3 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya.....	28
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	30
Tabel IV.1 Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Daerah	49
Tabel IV.2 Perhitungan Rasio Efisiensi Tertinggi per-Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan	58
Tabel IV.3 Perhitungan Rasio Efisiensi Terendah per-Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan	60
Tabel IV.4 Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Daerah.....	63
Tabel IV.5 Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Tertinggi per-Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan.....	71
Tabel IV.6 Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Terendah per-Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan.....	73
Tabel IV.7 Perbandingan Rasio Efisiensi Belanja dengan Rasio Keserasian Belanja.....	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1	Peta Kepulauan Bangka Belitung..... 37
Gambar IV.2	Peta Provinsi Bengkulu 40
Gambar IV.3	Peta Provinsi Jambi 42
Gambar IV.4	Peta Provinsi Lampung 45
Gambar IV.5	Peta Provinsi Sumatera Selatan..... 47

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Khusus Anggaran Belanja, Realisasi Belanja, Belanja Operasi, dan Belanja Modal Provinsi Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan
- Lampiran 2 Jadwal Penelitian
- Lampiran 3 Surat Riset Penelitian
- Lampiran 4 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Tanda Pengesahan Perbaikan Skripsi
- Lampiran 6 Sertifikat *Toefl*
- Lampiran 7 Sertifikat Hafalan Surat-surat Pendek Al-Qur'an
- Lampiran 8 Sertifikat BUMDES
- Lampiran 9 Surat Keterangan Terjemahan Abstrak
- Lampiran 10 Surat Keterangan Bebas Plagiat
- Lampiran 11 Berita Acara Usulan Penelitian
- Lampiran 12 Daftar Hadir Seminar Usulan Penelitian
- Lampiran 13 Biodata

ABSTRAK

Pebby / 222016084/2020 / Analisis Perbandingan Rasio Efisiensi dengan Keserasian Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2017 / Akuntansi Sektor Publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi se-Sumatera Selatan selama 3 tahun dan untuk mengetahui kabupaten/kota yang memiliki kinerja keuangan paling baik selama 3 tahun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif. Tempat penelitian dilakukan di Kabupaten/kota di Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan. Variabel yang digunakan yaitu Rasio Efisiensi dan Rasio Keserasian Belanja. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan rasio efisiensi dan rasio keserasian belanja. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di provinsi se-Sumatera Bagian Selatan selama 3 tahun yang paling baik yaitu terdapat di Kota Bandar Lampung dengan rasio efisiensi sebesar 75,54% dibandingkan dengan rasio keserasian belanjanya yaitu rasio belanja operasi sebesar 84,16% dan rasio belanja modal sebesar 15,84% yang perbandingan antara rasio tersebut tingkat baik kinerja pemerintah daerah tidak jauh berbeda.

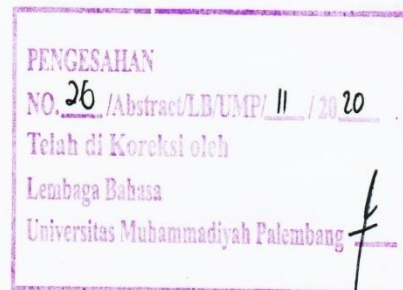
Kata kunci : Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Abstract

Pebby / 222016084/2020 / *The Comparative Analysis of Radio Efficiency and Expenditure Harmony in Local Government District City in South Sumatera 2015-2017 / Public Sector Accounting.*

This study aimed to determine the comparison of financial performance of district / city governments in South Sumatra for 3 years and to find out which districts / cities have the best financial performance for 3 years. This research was a comparative research. The research was conducted in Regencies / cities in the Provinces of South Sumatra. The variables used were Efficiency Ratio and Expenditure Harmony Ratio. The data used in this research was secondary data. Data collection technique used in this study was document analysis method. Data analysis methods used were quantitative and qualitative analysis. The data analysis techniques in this study were using efficiency ratios and expenditure harmony ratio. The results of this study showed that the financial performance of local governments in the districts / cities in the provinces of South Sumatra for the best 3 years was in Bandar Lampung City with an efficiency ratio was 75.54% compared to the ratio of expenditure harmony, namely the ratio of operating expenditure was 84.16% and the capital expenditure ratio was 15.84%, a comparison between these ratios the level of good performance of local governments was not much different.

Keywords: *Efficiency Ratio, Spending Match Ratio, Regional Government Financial Performance*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengurus dan mengatur bangsa dan negara. Sebagai organisasi nirlaba, tujuan utama dari suatu pemerintahan yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Meningkatnya perkembangan pelayanan terhadap masyarakat tersebut akan mempunyai dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akuntansi sektor publik dalam perkembangannya di Indonesia dalam waktu singkat berkembang semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap nasib suatu daerah karena dapat menjadikan daerah yang kuat serta dapat berkembang atau tidak, tergantung cara pemerintah daerah mengelola keuangan tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menjadikan aset daerah terjaga dan juga keutuhannya. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat dapat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Keberhasilan dalam otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah

tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, Pasal 4).

Kemampuan keuangan di dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan sangat penting karena pemerintah daerah tidak mampu melakukan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa adanya anggaran yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan. Hal inilah yang merupakan salah satu dasar tolak ukur untuk dapat mengetahui secara jelas kemampuan suatu daerah otonom mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Di dalam era otonomi daerah kemampuan keuangan daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah.

Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi (Sujarweni, 2015 : 107)

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekadar kemampuan menunjukkan guna uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Ekonomis berkaitan dengan pemilihan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah, efisiensi berarti bahwa penggunaan data masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (sumber daya guna), dan efektif yaitu bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan-tujuan kepentingan publik. Untuk mengukur kinerja keuangan, pemerintah daerah dapat menggunakan pos-pos laporan keuangan.

Ramli (2016 : 137) mengatakan bahwa laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan, dituangkan dalam angka-angka, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Angka-angka yang ada dalam laporan keuangan menjadi kurang berarti jika hanya dilihat satu sisi saja. Angka-angka lebih berguna apabila dapat dibandingkan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Caranya adalah dengan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan atau antar laporan keuangan. Perbandingan ini dikenal dengan nama analisis rasio keuangan.

Ramli (2016: 5) mengemukakan bahwa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya adalah dengan menggunakan rasio keuangan. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah Rasio kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*).

Menurut Mahmudi (2019: 160) Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modalnya secara optimal. Rasio keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasi berarti persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang (*recurrent*). Belanja Modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga tidak bersifat rutin. Belanja modal ini akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset daerah.

Mahmudi (2019: 164) menjelaskan bahwa rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan rasio anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%,

sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Adnyani dan Wiagustini (2018) pada penelitiannya berjudul Studi Komparatif: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sarbagita dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Bali. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemandirian, efektivitas PAD, pertumbuhan PAD, keserasian belanja, dan efisiensi belanja pada daerah Sarbagita dan Provinsi Bali. Hasil analisis menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah kota Denpasar lebih unggul dibandingkan dengan kinerja keuangan pemerintah provinsi Bali dari sisi efektivitas, pertumbuhan, dan keserasian. Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Badung unggul dibandingkan dengan kinerja keuangan provinsi Bali dari semua rasio kecuali rasio efisiensi. Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Gianyar unggul dibandingkan dengan kinerja keuangan provinsi Bali dari sisi efektivitas, pertumbuhan, dan keserasian. Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Tabanan unggul dibandingkan dengan provinsi Bali dari sisi efektivitas dan pertumbuhan.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Arthaingan (2018) pada penelitiannya yang berjudul Analisis Perbandingan Rasio Keuangan Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Barat. Indikator kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, dan rasio keserasian belanja. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah kota dengan kinerja keuangan terbaik secara berturut-

turut adalah Kota Bekasi, dan kemudian Kota Bandung, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya. Selanjutnya melalui uji beda *kolmogorov smirnov* menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan di sembilan pemerintah kota di Jawa Barat.

Penelitian yang akan dilakukan ini mengambil objek yang berbeda yaitu daerah otonomi di kabupaten/kota Se-Sumatera Bagian Selatan pada tahun 2015-2017 yang terdiri dari 5 Provinsi yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Sumatera Selatan.

Tabel I.1
Anggaran Belanja Daerah, Realisasi Belanja Daerah, Belanja Operasi, dan Belanja Modal
Kabupaten/kota per-Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan
Tahun 2015-2017

(Dalam Jutaan Rupiah)

Provinsi	Jmlh Kab/ Kota	Total Dari Seluruh Kabupaten/Kota Per-Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan																				
		Total Anggaran Belanja Daerah			Total Realisasi Belanja Daerah			Realisasi/Anggaran (%)			Total Belanja Operasi			Belanja Operasi/ Realisasi Belanja (%)			Total Belanja Modal			Belanja Modal/ Realisasi Belanja (%)		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Kepulauan Bangka Belitung	7	6.423.871	5.897.713	6.167.113	5.522.886	5.225.908	5.451.762	85,97	88,60	88,40	4.005.755	3.751.401	4.211.682	72,53	71,78	77,25	1.515.608	1.472.070	1.238.697	27,44	28,17	22,72
Bengkulu	10	8.118.035	9.071.570	8.250.559	7.368.579	8.234.428	7.511.220	90,76	90,77	91,03	5.487.198	5.769.391	5.765.272	74,47	70,06	76,76	1.880.981	2.222.975	1.735.374	25,53	27,00	23,10
Jambi	11	11.309.278	11.931.163	11.910.478	10.471.341	11.026.620	10.843.209	92,59	92,41	91,03	7.630.190	8.077.680	7.811.138	72,87	73,26	72,04	2.741.110	2.785.862	3.018.349	26,18	25,26	27,84
Lampung	15	18.666.628	19.125.387	19.680.745	16.509.632	16.300.206	17.967.648	88,44	85,22	91,29	12.700.602	12.041.482	13.076.866	76,93	73,87	72,78	3.803.390	4.179.517	4.558.108	23,04	25,64	25,37
Sumatera Selatan	17	24.630.167	26.177.988	25.577.615	21.601.637	22.717.684	23.026.517	87,70	86,78	90,02	15.226.837	16.498.686	16.358.319	70,49	72,62	71,04	6.187.058	6.119.723	6.263.019	28,64	26,94	27,20

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2019

Tabel I.1 menunjukkan data total seluruh Anggaran Belanja Daerah, Realisasi Belanja Daerah, Belanja Operasi, dan Belanja Modal dari 60 Kabupaten/Kota per Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan yang terdiri dari 5 Provinsi yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan selama 3 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Fenomena yang terjadi pada kabupaten/kota Se-Sumatera Bagian Selatan selama 3 tahun yaitu menunjukkan Kabupaten/Kota dari kelima Provinsi mengalami fluktuatif atau mengalami kenaikan dan penurunan, kemampuan setiap daerah dalam mengelola belanja modal untuk membiayai kegiatannya tergolong melebihi batas kriteria belanja modal yaitu 20%, sedangkan pada kabupaten/kota se-Sumatera Bagian Selatan belanja modal yang diperoleh dari setiap tahunnya selalu diatas 20% serta terjadinya fluktuasi yang menyebabkan keserasian belanjanya belum dapat dikatakan seimbang. Dan pada Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan terdapat dua provinsi yang belum dapat dikatakan efisien yaitu Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi dikarenakan persentase belanja daerah yang dicapai setiap tahunnya selalu diatas 90% yang termasuk dalam kategori kurang efisien, hal ini menunjukkan bahwa provinsi tersebut belum mampu melakukan penghematan anggaran belanja daerahnya.

Hal inilah yang menjadikan salah satu faktor wilayah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Disebabkan pemerintah daerah masih belum mampu merealisasikan anggaran belanja daerahnya dengan baik. Analisis belanja daerah sangatlah

penting dilakukan untuk mengevaluasi Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perbandingan Rasio Efisiensi dengan Keserasian Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2017”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah perbandingan rasio efisiensi dengan rasio keserasian belanja pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi se-Sumatera Bagian Selatan dari tahun 2015 sampai dengan 2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbandingan rasio efisiensi dengan rasio keserasian belanja pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi se-Sumatera Bagian Selatan dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penambahan ilmu pengetahuan bagi penulis terutama dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja keuangan daerah selama periode yang ditentukan.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Se-Sumbagsel

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran didalam menentukan kebijakan pengelolaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi kalangan Perguruan Tinggi dan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian lain dengan topik yang sama atau sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisman. 2014. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Vol. 1 (02): 48-54
- Arthaingan H. Mutiha. 2018. Analisis Perbandingan Rasio Keuangan Pemerintah Kota di Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)*, Vol. II (02): 1-10.
- Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Dio Kris Hananto. 2018. Analisis Efisiensi Industri Telekomunikasi Seluler di Indonesia 2008-2014. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP)*, Vol.1 (02).
- [Http://bpk.go.id](http://bpk.go.id)
- Lusiana Selly Kopong. 2019. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012-2016 (Studi Pada Empat Kabupaten Pemekaran Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 7 (01): 31-44.
- M. Ramli Faud. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Cetakan pertama. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Cetakan pertama. Edisi 4. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Muhammad Mahsun. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi ke-4. BPFE. Yogyakarta.
- Ni Putu Novianti Wira Adnyani dan Ni Luh Putu Wiagustini. 2018. Studi Komparatif: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sarbagita dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 7 (02): 1111-1141.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Renyowijoyo Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Rigel Nurul Fathah. 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis, dan Perbankan*, Vol. 8 (01): 33-48.
- Sony Kristiyanto dan Sugeng Widodo. 2017. Analisis Efisiensi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 17 (01): 1-12.
- Taufik. 2017. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Se-Sumatera. *Jurnal Ilmiah GEMA Ekonomi*, Vol. 7 (01): 993-1012.
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- V. Wiratna Sujarweni. 2019. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.